

**ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA
DAN MEKANISME *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE***

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**DESIE FATAYATININGRUM
NIM. C2C607040**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Desie Fatayatiningrum
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607040
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN
LABA DAN MEKANISME *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi
Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di
BEI Tahun 2008-2009)**
Dosen Pembimbing : Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, SE., M.Si., Akt.

Semarang, 20 Juni 2011

Dosen Pembimbing,



Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, SE., M.Si., Akt.

NIP. 19711026 200003 1001

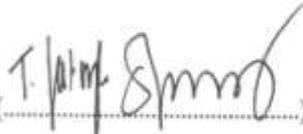
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Desie Fatayatiningrum
Nomor Induk Mahasiswa : C2C607040
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA
DAN MEKANISME *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE
ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi
Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI
Tahun 2008-2009)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Juli 2011

Tim Penguji

1. Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, SE., M.Si., Akt. ()

2. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt. ()

3. Puji Harto, SE., M.Si., Akt. ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Desie Fatayatiningrum, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Environmental Disclosure* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 29 Juni 2011

Yang membuat pernyataan,



(Desie Fatayatiningrum)
NIM : C2C607040

ABSTRACT

The tendency will environmental awareness has brought a change of attitude toward the profit orientation of the environmental orientation of the company. Management as agents can not avoid the reality of the impact of corporate activity that not only generate profits and raise share prices, but also cause environmental impacts such as damage to ecosystems, pollution, effluents and waste and all of these are company responsibility in relation to the environmental aspects. This research is aimed to examine the influence of earnings management and corporate governance mechanisms to corporate environmental disclosure (CED). Earnings management was measure by discretionary accruals use Khotari et al. (2005) model.

The population of this research is 266 companies in the non-financial companies which were listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2008-2009. Data used in this study come from annual reports and sustainable report of non-financial companies listed on the IDX and the Program for Pollution Control Evaluation and Rating (PROPER) in 2008-2009 with a total of 28 companies. Samples are obtained by using purposive sampling method. Hypothesis testing method used is multiple regression analysis.

Result of this research indicates that number of audit committee meetings and profitability had a significant effect to corporate environmental disclosure. Meanwhile, earnings management, the proportion of independent commissioners, size corporate, leverage and tipe industry had not significant effect to corporate environmental disclosure.

Keywords: Earnings Management, Corporate Governance Mechanisms, Corporate Environmental Disclosure.

ABSTRAK

Kecenderungan akan kesadaran lingkungan telah membawa perubahan sikap dari orientasi laba menuju orientasi lingkungan yang dilakukan perusahaan. Manajemen sebagai agen tidak bisa menghindari kenyataan akan dampak dari aktivitas perusahaan yang tidak hanya menghasilkan laba dan menaikkan harga saham, tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan seperti kerusakan ekosistem, polusi, limbah cair dan limbah yang semuanya merupakan tanggung jawab perusahaan yang berhubungan dengan aspek lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate environmental disclosure* (CED). Manajemen laba diukur dengan *discretionary accrual* menggunakan model Khotari *et al.* (2005).

Populasi dari penelitian ini adalah 266 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2009. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan serta laporan keberlanjutan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI dan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) tahun 2008-2009 dengan total 28 perusahaan. Sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *corporate environmental disclosure*. Sementara itu, manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, leverage, dan tipe industri tidak berpengaruh signifikan terhadap *corporate environmental disclosure*.

Kata kunci : Manajemen Laba, Mekanisme *Corporate Governance*, *Corporate Environmental Disclosure*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *CORPORATE ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009)”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman, M.Si., Akt selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademis.
3. Bapak Tri Jatmiko Wahyu Prabowo, SE., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar membimbing, memberikan saran dan dukungan dalam penulisan skripsi ini dan menjadi motivator dan inspirator bagi penulis.
4. Bapak Drs. H. Sudarno, M.Si, Akt, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Reguler 2.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas bimbingan dan pengajaran yang diberikan dalam masa studi penulis.

6. Orang tuaku tercinta Ibu Sunarti dan Bapak Mudjiran, S.ST. Terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, nasihat, semangat, dan doa yang selalu diberikan untuk kesuksesan penulis. Maafkan penulis jika jiwa dan raga ini belum sepenuhnya berbakti. Semoga Allah memuliakan ibu dan bapak selamanya. Amin.
7. Kakakku tersayang Eka Kartika Sari, SE. dan mas Rizki Rahadiawan, S.AB. yang baru menjadi kakak iparku. Terima kasih atas dukungan, bantuan, nasihat, dan doa.
8. Sahabat sepanjang perjalanan hidupku Venda Arsenia Laksmita. Terima kasih telah menjadi sahabat dalam suka dan duka dari bangku TK hingga penulis menjadi mahasiswi.
9. Para sahabatku : Azizah, Himmah, Nina, Mba Nyta, Ella, Mba Lulud, Abhie, Tito, Dhema, Dwi, Sawitri, Della, Rida, Anggi, Tia, Trigu, Jenia. Terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan, inspirasi, dan motivasi selama ini. Semoga kita bisa menggapai kesuksesan bersama.
10. Ageng Widhi Anugerah dan Kartika Sayidatina. Terima kasih telah memberikan inspirasi dan dukungan pada penulis.
11. Mas Hasto. Terima kasih untuk semua bantuan, masukan dan arahan kepada penulis selama ini.
12. Seluruh teman-teman Akuntansi Reguler II angkatan 2007 kelas A dan B. Terima kasih untuk kekeluargaan, kebersamaan, dan kekompakan selama di bangku kuliah.
13. Teman-teman seangkatan dan kakak senior di UKSA-387 UNDIP yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang tak terlupakan selama bekerja sama di UKSA-387 baik dalam kegiatan, kepengurusan maupun dalam kepanitiaan. I Love Diving! UKSA OK!

14. Seluruh staf karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi UNDIP yang telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mahasiswa.
15. Sekretaris perusahaan sampel (PT Indo Acidatama, PT Toba Pulp Lestari, PT Indah Kiat, PT Suparma, dan PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia). Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu dalam perolehan data penelitian dengan membalas *email* dan mengirim *annual report* baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.
16. Teman-teman KKN PPM Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung tahun 2011 (Pak Kordes: Michael, Rere, Della, Josh a.k.a Herdhian, Cesar, Harry, Chika, Faiz).
17. Semua pihak yang telah sangat membantu namun tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk sekecil apapun doa yang kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan wacana bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 29 Juni 2011

Penulis,

Desie Fatayatiningrum

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

“Hai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153)

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”
(QS. Al-Insyirah : 6 – 8)*

“Jika engkau di waktu sore maka janganlah engkau menunggu pagi dan jika engkau di waktu pagi janganlah menunggu sore.” (HR. Bukhori)

*Skripsi ini kupersembahkan untuk
Orang tuaku tercinta sebagai bukti cinta dan baktiku
Kakakku tercinta dan kakak iparku tersayang
Seluruh keluarga, saudara, dan sahabat-sahabat
Terima kasih untuk doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian	10
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	12
2.1.1 Teori Agensi.....	12
2.1.2 Teori Sinyal.....	15

2.1.3 Teori <i>Stakeholder</i>	17
2.1.4 Teori Legitimasi	19
2.1.5 <i>Corporate Social Responsibility</i>	22
2.1.6 <i>Corporate Environmental Disclosure (CED)</i>	23
2.1.7 Manajemen Laba	28
2.1.8 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	33
2.1.8.1 Dewan Komisaris	35
2.1.8.2 Komite Audit	38
2.2 Penelitian Terdahulu	40
2.3 Kerangka Pemikiran	45
2.4 Pengembangan Hipotesis	46
2.4.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	46
2.4.2 Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	48
2.4.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen	49
2.4.2.2 Jumlah Rapat Komite Audit	50
 BAB III METODE PENELITIAN	 51
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	51
3.1.1 Variabel Dependen	51
3.1.2 Variabel Independen	52
3.1.2.1 Manajemen Laba	53
3.1.2.2 Mekanisme <i>Corporate Governance</i>	55
3.1.3 Variabel Kontrol	56
3.1.3.1 Ukuran Perusahaan	56
3.1.3.2 Profitabilitas	57
3.1.3.3 <i>Leverage</i>	57
3.1.3.4 Tipe Industri	58

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	59
3.2.1 Populasi Penelitian	59
3.2.2 Sampel Penelitian	59
3.3 Jenis dan Sumber Data	60
3.4 Metode Pengumpulan Data	60
3.5 Metode Analisis	60
3.5.1 Statistik Deskriptif	61
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	62
3.5.2.1 Uji Normalitas	62
3.5.2.2 Uji Multikolinieritas	63
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas	64
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	65
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	65
3.5.4 Uji Hipotesis	66
3.5.4.1 Uji Statistik t	66
3.5.4.2 Uji Statistik F	67
3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	68
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	69
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	69
4.2 Statistik Deskriptif	70
4.3 Uji Asumsi Klasik	73
4.3.1 Uji Normalitas	74
4.3.2 Uji Multikolinieritas	76
4.3.3 Uji Heteroskedastisitas	77
4.3.4 Uji Autokorelasi	78
4.4 Analisis Regresi Berganda	79
4.5 Uji Hipotesis	82
4.5.1 Uji Statistik t	82
4.5.2 Uji Statistik F	84
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	84
4.6 Interpretasi Hasil	85

BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan	93
5.2 Keterbatasan.....	93
5.3 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Kriteria Peringkat PROPER.....	27
Tabel 2.2 Ringkasan Perbandingan Penelitian Terdahulu	43
Tabel 4.1 Proses Penentuan Sampel.....	69
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	70
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif- <i>Dummy Variabel</i>	70
Tabel 4.4 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test	74
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas: Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF	77
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi : <i>Durbin-Watson</i>	79
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	80
Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik F.....	84
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi.....	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Stuktur Board of Director (BoD) dalam <i>One Tier System</i>	36
Gambar 2.2 Struktur BoD dan BoC dalam <i>Two Tiers System</i> yang berkembang di Indonesia	37
Gambar 2.3 Model Kerangka Pemikiran Penelitian	45
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas: Grafik Histogram	75
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas: Grafik <i>Normal P-P Plot</i>	76
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas: Grafik Scatterplot.....	78

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Perusahaan Sampel	102
Lampiran B Item-Item <i>Corporate Environmental Disclosure</i>	103
Lampiran C Tabulasi Data Mentah	106
Lampiran D Perhitungan <i>Discretionary Accrual</i>	108
Lampiran E Mencari Nilai Beta	110
Lampiran F Output SPSS.....	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak kontribusi bagi masyarakat, misalnya memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang untuk dikonsumsi, membayar pajak, memberikan sumbangan. Karena kontribusi tersebut, perusahaan mendapat legitimasi bergerak leluasa untuk melaksanakan kegiatannya (Almilia dan Wijayanto, 2007). Namun dibalik semua itu, perusahaan juga memiliki kontribusi yang besar terhadap kondisi sumber daya alam yang semakin menipis serta makin buruknya lingkungan alam. Hal ini disebabkan karena kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam serta proses produksi yang mau tidak mau menghasilkan limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Di Indonesia masalah pencemaran lingkungan juga telah banyak terjadi seperti kasus PT Newmont Mining Corporation yang menggunakan teknologi berbahaya di laut, yaitu pembuangan limbah tambang (*tailing*) ke laut (*submarine tailing disposal*) yang terbukti telah mengakibatkan pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, oleh PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dan pencemaran di Teluk Senunu, Sumbawa, oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Bahkan hasil survei Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang dilakukan bulan September 2004 di daerah Tonggo Sejong, Benete, dan Lahar, Nusa Tenggara Barat, menunjukkan sekitar 76%-100% responden nelayan

menyatakan bahwa pendapatannya menurun setelah PT NNT membuang *tailing* ke Teluk Senunu, yang besarnya pencemaran mencapai 120.000 ton per hari atau 60 kali besar *tailing* PT NMR di Teluk Buyat. PT Newmont membuang sedikitnya 5 milyar ton limbah ke sungai, danau, dan hutan-hutan hingga laut (Wisanggeni, 2010). Selain itu, masih banyak kasus lainnya seperti pabrik pulp dan kertas di Porsea, Sumatera Utara, PT Inti Indorayon yang mengganggu ekosistem Danau Toba serta banjir lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur oleh PT Lapindo Brantas yang sampai sekarang belum tertangani dengan baik. Fakta ini merupakan cerminan bahwa perhatian perusahaan masih rendah terhadap dampak lingkungan dari aktifitas industri yang dilakukan.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perusahaan, menimbulkan tekanan dari berbagai pihak khususnya masyarakat terhadap perusahaan agar memberikan informasi yang transparan mengenai aktivitas lingkungannya (Anggraini, 2006). Perwita (2009) menyatakan bahwa perusahaan dapat memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui *environmental disclosure* yaitu pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab lingkungan dalam instrumen laporan keuangan. *Environmental disclosure* mencakup pengungkapan tentang lingkungan hidup, juga mengungkapkan informasi mengenai energi serta kesehatan dan keselamatan kerja (Gray *et al.*, 2001). Dalam laporan tahunan perusahaan seringkali *environmental disclosure* diungkapkan oleh perusahaan ke dalam bagian *Safety, Health and Environment (SHE)*.

Pengungkapan informasi lingkungan secara implisit tercermin dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagaimana tertulis dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (revisi 2009) paragraf dua belas:

Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan

Dari pernyataan PSAK di atas, dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial terutama informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan hanya mengungkapkan informasi tersebut secara sukarela. Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi sosial maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut (Anggraini, 2006).

CSR saat ini bukan lagi sebagai tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan yang bersifat sukarela (*voluntary*), melainkan bersifat wajib (*mandatory*) yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal ini diatur dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan. Pasal 66 Undang-Undang ini juga mewajibkan perseroan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut dalam Laporan Tahunan.

Sejalan dengan adanya peraturan tersebut, kini banyak perusahaan yang mulai mengungkapkan informasi sosial lingkungannya kepada publik. Darwin (dikutip oleh Novita dan Djakman, 2008) mengungkapkan bahwa pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan ekonomi di dalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), dan keterbukaan (*transparancy*) perusahaan kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Selain itu, Utama (2007) menyatakan bahwa praktik dan pengungkapan CSR merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep *good corporate governance* (GCG), yang prinsipnya menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholder* sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerjasama yang aktif dengan *stakeholder* demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Dengan adanya mekanisme dan struktur *governance* ini dapat mengurangi asimetri informasi.

Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistis seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja

ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (*principal*). Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Beberapa penelitian empiris sebelumnya banyak berfokus pada pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) dengan kinerja keuangan perusahaan atau *corporate financial performance* (CFP). Namun dalam penelitian ini lebih berfokus pada pengkajian pengaruh manajemen laba dan *corporate governance* terhadap CSR yang diproksikan dengan *corporate environmental disclosure* (CED).

Chih, Shen dan Kang (2008) dan Prior, Surroca dan Tribo (2008) merupakan artikel utama yang mengeksplorasi hubungan antara CSR dan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Prior *et al.* (2008) menunjukkan hasil bahwa ada pengaruh positif dari praktik manajemen laba (*earnings management*) terhadap CSR. Prior *et al.* (2008) mengemukakan bahwa para manajer umumnya mempunyai kecenderungan untuk melakukan korupsi dengan *stakeholder* lain melalui pelaksanaan dan pengungkapan CSR dengan menggunakan kelebihan keuntungan untuk konsumsi dan perilaku oportunistik. Sedangkan Chih *et al.* (2008) menemukan adanya hubungan negatif antara manajemen laba dengan CSR, ketika manajemen laba diproksikan dengan perataan laba (*income smoothing*). Perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR lebih diharapkan untuk mengurangi kemungkinan perataan laba.

Selanjutnya penelitian mengenai hubungan *corporate governance* (CG) dan *corporate social responsibility* (CSR) juga telah banyak dilakukan di berbagai negara dan dalam kurun waktu yang berbeda. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Foker (1992) (dalam Said, Zainudin dan Harun, 2009) yang menemukan bahwa keberadaan komite audit dapat mengurangi biaya agensi dan meningkatkan pengendalian internal serta meningkatkan kualitas pengungkapan. Sependapat dengan hasil tersebut, Said *et al.* (2009) menemukan bahwa faktor kepemilikan oleh pemerintah dan komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Malaysia. Namun Waryanto (2010) tidak menemukan adanya hubungan antara komite audit terhadap luas pengungkapan CSR.

Menurut Belkaoui dan Karpik (dalam Anggraini, 2006) perusahaan melakukan pengungkapan informasi sosial (*CSR disclosure*) dengan tujuan untuk membangun *image* pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Namun, karena kurangnya pengawasan pada sistem pengawasan perusahaan, manajer dapat dengan mudah melakukan tindakan manajemen laba dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Untuk itu perlu adanya komite audit yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal (Widiatmaja, 2010). Oleh karena itu, pelaku CSR sebaiknya tidak memisahkan aktivitas CSR dengan *Good Corporate Governance* karena keduanya merupakan satu continuum (kesatuan), dan bukan merupakan penyatuan dari

beberapa bagian yang terpisahkan. Murwaningsari (2009) menyatakan bahwa gagasan utama *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik adalah mewujudkan tanggung jawab sosial (CSR). Dari beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* mempunyai keterkaitan erat dengan manajemen laba begitu pula antara *corporate social responsibility* dan *corporate governance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sun, Salama, Hussainey dan Habbash (2010) dan Handajani, Sutrisno dan Chandrarin (2010). Penelitian terdahulu dilakukan oleh Sun *et al.* (2010) dengan *setting* di Inggris pada perusahaan yang terdaftar di *Financial Times and the London Stock Exchange* (FTSE) antara tahun 2006-2007 yang meneliti hubungan antara *corporate environmental disclosure* dan manajemen laba dan dampak mekanisme *corporate governance* terhadap asosiasi tersebut. Menurut Sun *et al.* (2010) ada hubungan signifikan antara *corporate environmental disclosure* dengan manajemen laba. Kemudian Sun *et al.* (2010) juga menemukan bahwa hanya variabel jumlah rapat komite audit yang berpengaruh terhadap hubungan *corporate environmental disclosure* dan manajemen laba.

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun *et al.* (2010), antara lain adalah tidak digunakannya variabel ukuran dewan direksi (*board size*) sebagai pengukuran (*proxy*) dari mekanisme *corporate governance* karena disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system*, yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan

(komisaris). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini variabel ukuran dewan direksi (*board size*) diganti dengan variabel dewan komisaris dengan menggunakan *proxy* yaitu proporsi dewan komisaris independen. Penggantian mekanisme *corporate governance* dari variabel moderating menjadi variabel independen berdasarkan pada penelitian Handajani *et al.* (2010) yang menguji tentang pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Penelitian tersebut berhasil menemukan dampak yang signifikan pada faktor manajemen laba, komite audit, profil perusahaan, dan jenis industri terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

Penelitian ini dimotivasi karena adanya ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chih *et al.* (2008), Prior *et al.* (2008) serta Sun *et al.* (2010). Penelitian ini menarik karena *corporate environmental disclosure* dianggap penting sebagai wujud pertanggungjawaban manajemen kepada *stakeholder* dan juga agar perusahaan tetap dapat berkelanjutan (*sustainable*) dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Kerusakan lingkungan yang diakibatkan aktivitas perusahaan semakin meluas. Hal ini merupakan bukti belum optimalnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Meskipun telah ada peraturan dan standar tentang pengelolaan lingkungan. Akan tetapi sampai sekarang pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketidakkonsistenan (*research gap*) antara hasil yang satu dengan yang lainnya.

Dalam penelitian ini *corporate environmental disclosure* akan digunakan sebagai proksi dari CSR dengan alasan bahwa saat ini perhatian pihak eksternal terhadap aktivitas lingkungan perusahaan semakin tinggi ditambah dengan adanya masalah perubahan iklim dunia atau sering disebut *global warming* yang kian hari semakin marak dibicarakan. Oleh karena adanya ketidakkonsistenan antara hasil penelitian sebelumnya, perlu diuji kembali bagaimana pengaruh antara manajemen laba dan *corporate governance* terhadap CSR.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap *corporate environmental disclosure*?
2. Apakah mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate environmental disclosure*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh manajemen laba terhadap *corporate environmental disclosure*.
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit terhadap *corporate environmental disclosure*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang dapat diperoleh jika hasil penelitian ini signifikan secara statistik adalah:

1. Memberikan gambaran mengenai pengaruh manajemen laba terhadap *corporate environmental disclosure*.
2. Memberikan gambaran mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit terhadap *corporate environmental disclosure*.
3. Selain itu sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang diajukan dalam penyusunan skripsi ini untuk memberikan gambaran dari permasalahan pokok yang dicakup dalam uraian ringkas pada masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan bab pertama dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini merupakan uraian landasan teori yang melandasi manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* dan pengaruhnya terhadap *corporate environmental disclosure*, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskripsi variabel dependen dan independen yang digunakan dalam penelitian. Selain itu bab ini juga menguraikan tentang analisis data dan interpretasi data berdasarkan alat dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan (*principal*). Wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Jensen dan Meckling (1976) (dikutip dari Waryanto, 2010) menjelaskan adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan. Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Teori agensi mampu menjelaskan potensi konflik kepentingan diantara berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan tersebut. Konflik kepentingan ini terjadi dikarenakan perbedaan tujuan dari masing-masing pihak berdasarkan posisi dan kepentingan terhadap perusahaan (Ibrahim, 2007). Sebagai agen, manajer bertanggungjawab secara moral untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun demikian manajer juga menginginkan untuk selalu memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan di mana masing-masing pihak

berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002 dalam Isnanta, 2008).

Pada teori agensi juga dijelaskan mengenai masalah asimetri informasi (*information asymmetry*). Asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan oportunistik seperti manajemen laba (*earnings management*) mengenai kinerja ekonomi perusahaan sehingga dapat merugikan pemilik (pemegang saham). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Richardson (1998) dalam Ujijantho dan Pramuka (2007) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Hal ini berarti apabila manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham maka kecenderungan manajer untuk berbuat curang dengan praktik manajemen laba demi kepentingan pribadinya akan semakin tinggi. Dechow *et al.* (1996) (dalam Sun *et al.*, 2010) menyatakan bahwa ketika manajer dicurigai melakukan manajemen laba maka hal ini akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang turun di pasar saham. Dalam hal ini apabila manajemen laba secara substansial terdeteksi maka pihak eksternal (investor dan *stakeholder*) akan melakukan tindakan disipliner terhadap manajer.

Dengan adanya masalah agensi yang disebabkan karena konflik kepentingan dan asimetri informasi ini, maka perusahaan harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*). *Agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk biaya pengawasan terhadap agen, pengeluaran yang mengikat oleh agen, dan adanya *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya

penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan prinsipal akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya penyimpangan tersebut disebut *residual loss* (Jensen dan Meckling, 1976).

Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dalam hal ini adalah *corporate environmental disclosure* memiliki tujuan untuk membangun *image* positif terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Dalam rangka memberikan informasi pertanggungjawaban sosial perusahaan memerlukan biaya, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah. Ketika perusahaan menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. Jadi pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya pengawasan dan biaya kontrak (biaya keagenan), (Belkaoui dan Karpik, 1989 dalam Anggraini, 2006).

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Kemudian sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal dengan melakukan *corporate environmental disclosure* sebagai tindakan CSR. Sun *et al.*

(2010) menyatakan bahwa *corporate environmental disclosure* merupakan sinyal yang dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya dan sebagai hasilnya harga saham di pasar modal akan meningkat seiring meningkatnya kepercayaan pemegang saham terhadap transparansi informasi yang diungkapkan oleh perusahaan.

2.1.2 Teori Sinyal

Teori Sinyal berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi. Salah satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah pengungkapan yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengungkapan informasi ini nantinya dapat mempengaruhi naik turunnya harga sekuritas perusahaan emiten tersebut (Suwardjono, 2005). Pengungkapan informasi akuntansi dapat memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik (*good news*) atau sebaliknya sinyal buruk (*bad news*) di masa mendatang.

Dorongan untuk mengemukakan informasi akuntansi tersebut adalah karena terdapat asimetri informasi antara manajemen (*agent*) dan *stakeholder* (*principal*). *Information Asymmetry* atau ketidaksamaan informasi adalah situasi di mana manajer memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik) mengenai kondisi atau prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor (Brigham, 1999 dalam Susetyo, 2006). Richardson, 1998 (dalam Wisnuwurti, 2010) menyatakan bahwa asimetri informasi dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan praktik manajemen laba (*earnings management*), keadaan di mana

manajer melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri dengan menggunakan estimasi dan metode akuntansi yang dapat menyembunyikan nilai ekonomi perusahaan yang benar dari *stakeholder*. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal kepada *stakeholder* tentang informasi keuangan yang dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk *et al.*, 2000 dalam Jama'an, 2008).

Teori sinyal dapat menjelaskan hubungan antara *corporate environmental disclosure* dengan manajemen laba. Sun *et al.* (2010) menyatakan bahwa manajer memiliki insentif yang besar untuk secara sukarela mengungkapkan informasi akuntansi tambahan misalnya, *corporate environmental disclosure* sebagai sinyal agar dapat menarik investor yang sudah ada dan/atau investor potensial untuk dapat meningkatkan reputasi positif dan nilai perusahaan, terutama ketika mereka mencoba terlibat dalam manajemen laba.

Gray *et al.* (2001) menjelaskan bahwa *corporate environmental disclosure* sebagai salah satu kegiatan CSR merupakan sinyal yang terkait dengan kualitas manajemen. Perusahaan yang memiliki kualitas yang tinggi cenderung menggunakan akuntansi sosial dan lingkungan perusahaan sebagai pengalihan dari pelaporan keuangan tradisional. Di sisi lain, perusahaan dengan kualitas rendah memilih konsisten dengan membatasi pengungkapan informasi akuntansi kepada pihak eksternal. Lebih jauh Gray *et al.* (2001) berpendapat bahwa kualitas pelaporan keuangan merupakan sinyal untuk pelaku pasar keuangan dan

stakeholder lainnya yang memperlihatkan bahwa manajemen mampu mengontrol risiko sosial dan lingkungan dalam perusahaan.

Selain itu, *corporate environmental disclosure* juga merupakan sinyal kepada investor dan *stakeholder* lainnya di mana perusahaan secara aktif ikut serta dalam praktik-praktik CSR dan menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik membantu perusahaan untuk mendapatkan keandalan reputasi dari pasar modal dan utang.

2.1.3 Teori Stakeholder

Pendekatan *stakeholder* muncul pada pertengahan tahun 1980-an. Latar belakang pendekatan *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi para manajer saat itu yaitu perubahan lingkungan (Freeman dan McVea 2001). Tujuan dari manajemen *stakeholder* adalah untuk merancang metode yang digunakan untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis (Freeman dan McVea, 2001).

Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea (2001) adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder (Clarkson, 1995). *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi : *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan

sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu : pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya.

Deegan (2004) menyatakan bahwa teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. Teori *stakeholder* memiliki bidang etika (moral) dan manajerial. Bidang etika berargumen bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh organisasi, dan manajer harus mengelola organisasi untuk keuntungan seluruh *stakeholder* (Deegan, 2004).

Sejalan dengan pernyataan tersebut Cahyonowati dalam Januarti dan Apriyanti (2005) mengemukakan bahwa teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*. Semakin kuat *stakeholder*, maka perusahaan harus semakin beradaptasi dengan *stakeholder*. Pengungkapan sosial dan lingkungan kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*.

Menurut Januarti dan Apriyanti (2005), ada beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*, yaitu :

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka,
2. Dalam era globalisasi telah mendorong produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan,
3. Para investor dalam menanamkan modalnya cenderung untuk memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dan program lingkungan,
4. LSM dan pencinta lingkungan makin vokal dalam mengkritik perusahaan-perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka.

2.1.4 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berhubungan erat dengan teori *stakeholder*. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di

masyarakat (Deegan, 2004). Menurut Deegan (2004), dalam perspektif teori legitimasi, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktifitasnya jika manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori legitimasi bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. Kontrak sosial adalah suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, namun berubah seiring berjalannya waktu. Hal ini menuntut perusahaan untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi (Deegan, 2004).

Lidblom (1994) dalam Guthrie dan Richerri (2006) mengemukakan bahwa, jika perusahaan merasa bahwa legitimasinya dipertanyakan maka dapat mengambil beberapa strategi perlawanan, yaitu:

1. Perusahaan dapat berupaya untuk mendidik dan menginformasikan kepada *stakeholder*-nya mengenai perubahan yang terjadi dalam perusahaan.
2. Perusahaan dapat berupaya untuk merubah pandangan *stakeholder* tanpa mengganti perilaku perusahaan.
3. Perusahaan dapat berupaya untuk memanipulasi persepsi *stakeholder* dengan cara membelokkan perhatian *stakeholder* dari isu yang menjadi perhatian kepada isu lain yang berkaitan dan menarik.
4. Perusahaan dapat berupaya untuk mengganti dan mempengaruhi harapan pihak eksternal tentang kinerja (*performance*) perusahaan.

Dalam teori legitimasi, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial (Guthrie dan Parker, 1989). Hal ini seringkali dapat dicapai melalui pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan *disclosure* untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi (Lindblom, 1994 dalam Guthrie dan Richerri, 2006). Sejumlah studi terdahulu melakukan penilaian atas pengungkapan lingkungan sukarela laporan tahunan dan memandang pelaporan informasi lingkungan dan sosial sebagai metode yang digunakan organisasi untuk merespon tekanan publik (Guthrie dan Richerri, 2006).

Berdasarkan kajian tentang teori *stakeholder* dan teori legitimasi, dapat disimpulkan bahwa kedua teori tersebut memiliki penekanan yang berbeda tentang pihak-pihak yang dapat mempengaruhi luas pengungkapan informasi di dalam laporan keuangan perusahaan. Teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan. Sedangkan teori legitimasi menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi di dalam laporan keuangan.

2.1.5 *Corporate Social Responsibility*

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi dan interaksi dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006).

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD), *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk pembangunan.

John Elkington (dalam Titisari, 2010) menerjemahkan CSR sebagai *tripel bottom line*, yaitu: *Profit, People*, dan *Planet*. Dapat diartikan bahwa tujuan CSR harus mampu meningkatkan laba perusahaan, menyejahterakan karyawan dan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *sustainability reporting*. *Sustainability reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi (ACCA, 2004 dalam Anggraini, 2006). *Sustainability report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan

dan peluang *sustainability development* yang membawanya menuju kepada *core business* dan sektor industrinya.

2.1.6 Corporate Environmental Disclosure

Pengungkapan secara umum terbagi atas dua jenis yaitu, *voluntary disclosure* dan *mandatory disclosure*. *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan berbagai informasi yang berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan secara sukarela. Meski pada kenyataannya pengungkapan secara sukarela tidak benar-benar terjadi karena terdapat kecenderungan bagi perusahaan untuk menyimpan dengan sengaja informasi yang sifatnya dapat menurunkan arus kas. Hal tersebut dianggap dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu, manajer suatu perusahaan hanya akan mengungkapkan informasi yang baik (*good news*) yang dapat menguntungkan perusahaan.

Jenis pengungkapan yang lain adalah *mandatory disclosure*. *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan informasi berkaitan dengan aktivitas/keadaan perusahaan yang bersifat wajib dan dinyatakan dalam peraturan hukum. Berbeda dengan pelaporan yang bersifat *voluntary*, pelaporan jenis *mandatory* akan mendapat sorotan dan kontrol dari lembaga yang berwenang. Terdapat standar yang menjamin kesamaan bentuk secara relatif dalam praktik pelaporan dan juga terdapat persyaratan minimum yang harus dipenuhi. *Mandatory disclosure* juga dapat menjadi jembatan atas asimetri informasi antara investor dengan manajer perusahaan atas kebutuhan informasi.

Laporan yang berkaitan dengan informasi yang bersifat non keuangan seperti CSR telah diatur dalam undang-undang dan bersifat *mandatory* melalui Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Meskipun terdapat beberapa hal yang mendukung namun berkaitan dengan aspek lingkungan, belum terdapat suatu peraturan yang benar-benar mengatur tentang pengungkapannya. Bethelot (2002) dalam Al Tuwaijri (2004) mendefinisikan *environmental disclosure* sebagai kumpulan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Informasi ini dapat diperoleh dengan banyak cara, seperti pernyataan kualitatif, asersi atau fakta kuantitatif, bentuk laporan keuangan atau catatan kaki. Sejalan dengan ini, menurut Wilmshurst dan Frost (2000) *environmental disclosure* adalah pengungkapan perusahaan yang terkait dengan dampak aktivitas-aktivitas perusahaan pada lingkungan fisik atau alam, di mana perusahaan tersebut beroperasi.

Menurut Darwin (2006) dalam Hermawati (2009), kini telah banyak perusahaan yang mengungkapkan kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosialnya melalui laporan tahunan atau laporan terpisah yang disebut *sustainability report* (laporan keberlanjutan) dan media lainnya seperti *website*. *Sustainability report* ini mencakup aspek kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi, dan sering dibuat dengan nama *environmental report*, *social report*, atau *environmental and social report* tergantung dari tujuan pengungkapannya.

Dalam penelitian ini digunakan standar GRI untuk menilai *environmental disclosure*. *Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah jaringan berbasis

organisasi yang telah memelopori perkembangan dunia, paling banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh dunia (www.globalreporting.org). Daftar pengungkapan sosial yang berdasarkan standar GRI juga digunakan oleh Handajani *et al.* (2010), peneliti ini menggunakan 6 indikator pengungkapan, yaitu: ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, hak asasi manusia, sosial dan produk. Berdasarkan bidang lingkungan (*environment*), indikator yang digunakan untuk penelitian ini hanyalah satu kategori, yaitu indikator kinerja lingkungan.

Corporate environmental disclosure dapat mempengaruhi tuntutan dan ketersediaan atas pelaporan keuangan yang bermutu melalui salah satu dari dua cara, yaitu *entrenchment effect* dan *alignment effect*. *Entrenchment effect* memotivasi perusahaan sebagai penyedia laporan keuangan untuk mengelola laba secara oportunistik. Manajemen mungkin memiliki insentif untuk mengejar keuntungan pribadinya dan mengambil alih kekayaan dari pemegang saham lainnya (Prior *et al.*, 2010). Hal ini dikarenakan kurang efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris.

Pandangan lain adalah *alignment effect*, yang didasarkan pada argumen bahwa perusahaan memiliki insentif untuk melaporkan dengan itikad baik dan dengan demikian memiliki laba yang berkualitas. Perusahaan dapat membuat keputusan lebih cepat dan memiliki insentif untuk menciptakan kesetiaan karyawan dalam jangka panjang (Wang, 2006).

Selama ini pengukuran terhadap kinerja lingkungan masih belum tercapai kesepakatan final. Hal ini karena setiap negara memiliki cara pengukuran sendiri tergantung situasi dan kondisi lingkungan negara masing-masing. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup telah menerapkan PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) sebagai alat untuk memeringkat kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan dapat dikategorikan peringkat Hijau atau Biru dalam PROPER PROKASIH, padahal perusahaan tersebut belum melakukan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan pengendalian pencemaran udara dengan baik. Karena kurang kondusifnya situasi di Tanah Air akibat krisis ekonomi dan politik dalam kurun waktu 1998-2001, pelaksanaan PROPER pernah terhenti. Guna memberikan gambaran kinerja penataan perusahaan lebih menyeluruh, maka sejak tahun 2002 aspek penilaian kinerja penataan dalam PROPER diperluas.

Kinerja penataan yang dinilai dalam PROPER mencakup: penataan terhadap pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3, dan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sedangkan penilaian untuk aspek upaya lebih dari taat meliputi penerapan sistem manajemen lingkungan, pemanfaatan limbah dan konservasi sumber daya, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*). Penilaian ini dapat mengukur penerapan CSR.

Penggunaan warna di dalam penilaian PROPER merupakan bentuk komunikatif penyampaian kinerja kepada masyarakat, mulai dari yang terbaik, EMAS, HIJAU, BIRU, MERAH, sampai ke yang terburuk, HITAM. Melalui

pemeringkatan warna ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memahami kinerja penataan masing-masing perusahaan. Sejauh ini dapat dikatakan bahwa PROPER merupakan sistem pemeringkatan yang pertama kali menggunakan peringkat warna. Berdasarkan uraian di atas, kriteria yang digunakan dalam pemeringkatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Peringkat PROPER

No.	Peringkat	Keterangan
1.	EMAS	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dan telah melakukan upaya 3 R (<i>Reuse, Recycle, Recovery</i>), menerapkan sistem pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, serta melakukan upaya-upaya yang berguna bagi kepentingan masyarakat jangka panjang.
2.	HIJAU	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai sistem pengelolaan lingkungan, mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat, termasuk melakukan upaya 3R (<i>Reuse, Recycle, Recovery</i>).
3.	BIRU	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
4.	BIRU MINUS	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi beberapa upaya belum mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

No.	Peringkat	Keterangan
5.	MERAH	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6.	MERAH MINUS	Melakukan upaya pengelolaan lingkungan, akan tetapi baru sebagian kecil mencapai hasil yang sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
7.	HITAM	Belum melakukan upaya pengelolaan lingkungan berarti, secara sengaja tidak melakukan upaya pengelolaan lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan, serta berpotensi mencemari lingkungan.

Sumber : Laporan PROPER periode 2008 – 2009

2.1.7 Manajemen Laba

Scott (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political costs (opportunistic Earnings Management)*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (Efficient Earnings Management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Copeland (1968) mendefinisikan manajemen laba sebagai, “*some ability to increase or decrease reported net income at will*”. Ini berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen untuk memaksimalkan, atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Kemudian Healy dan Wahlen (1999) dan Schipper (1989) dalam Subekti dkk. (2010) menyatakan bahwa “manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan *judgment* dalam penyusunan laporan keuangan dan penstrukturan transaksinya untuk merubah laporan keuangannya dan untuk mengelabui (*mislead*) para pemangku kepentingan perusahaan tentang kinerja ekonomi perusahaan atau mempengaruhi hasil kontrak (*contractual outcomes*) yang menggantungkan pada angka-angka laporan akuntansi. Ini artinya bahwa manajemen laba dapat dilakukan oleh para manajer melalui kebijakan metoda akuntansi (akun akrual) dan atau transaksi riil perusahaan. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Sugiri (1998) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu:

1. Definisi Sempit

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi manajemen laba dalam artian sempit ini di definisikan sebagai perilaku manajer untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*.

2. Definisi Luas

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer

bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Menurut Scott (2009) manajemen laba jika dilihat secara prinsip memang tidak menyalahi prinsip akuntansi yang berterima umum, namun manajemen laba dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat, maka hal ini dapat menurunkan nilai perusahaan karena banyak investor yang akan menarik kembali investasi yang telah mereka tanamkan. Praktik manajemen laba dinilai merugikan karena dapat menurunkan nilai laporan keuangan dan memberikan informasi yang tidak relevan bagi investor.

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen laba berarti suatu pengurangan dalam keandalan informasi laporan keuangan. Investor mungkin tidak menerima informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan risiko portofolionya (Ashari dkk, 1994) dalam Rahmawati dkk. (2006).

Sejalan dengan pendapat tersebut Surifah (2001) menyatakan bahwa manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas ekonomi yang ada, ini berarti kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupa atau menutupi realitas yang ada. Hal ini tidaklah aneh karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen disamping itu hal ini merupakan

sesuatu yang lazim bahwa besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Tidaklah mengherankan bila manajer sering berusaha menonjolkan prestasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang dicapai. Manajemen laba, terlepas dari positif atau negatif, jika dipandang dari sisi kualitas, akan mengindikasikan kualitas laba yang rendah, sebab laba tidak disajikan sebagaimana adanya.

Utami (2005) menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalah selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut *normal accruals* atau *non discretionary accruals*, dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut dengan *abnormal accruals* atau *discretionary accruals*.

Watts and Zimmermann (dalam Widiatmaja, 2010) menyatakan bahwa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba ada tiga (1) Hipotesis program bonus (*the bonus plan hypothesis*), yang didasarkan adanya dorongan manajer perusahaan untuk mendapatkan bonus berdasarkan laba yang dilaporkan oleh manajer. Scott (dalam Widiatmaja, 2010) menyebutkan motivasi bonus tersebut mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini. Manajer perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income* yang dilaporkan pada periode berjalan.

Healy (dalam Gumanti, 2000) beranggapan bahwa manajer akan memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang dilaporkan dalam upaya untuk memaksimalkan imbalan bonus. Lebih lanjut Healy menemukan bukti bahwa ada hubungan yang kuat antara akrual dan dorongan-dorongan tertentu yang mempengaruhi manajer untuk mengatur jumlah pendapatan yang dilaporkan, khususnya manajer akan memilih akrual yang menurunkan pendapatan pada saat pola bonus berada di bawah atau di atas batasan yang diikat, dan memilih akrual yang menaikkan pendapatan pada saat batasan tersebut tidak diikat. (2) Hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*). Motivasi *debt covenant* disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial (Widiatmaja, 2010). Motivasi ini muncul karena perjanjian antara manajer dan pemilik perusahaan berbasis pada kompensasi manajerial dan perjanjian hutang (*debt covenant*) (Ujiantho, 2007). Belkaoui (dalam Ujiantho, 2007) menjelaskan semakin tinggi rasio hutang suatu perusahaan maka semakin dekat perusahaan tersebut dengan kendala-kendala dalam perjanjian hutang dan semakin besar probabilitas pelanggaran perjanjian, jadi semakin mungkin manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income*. (3) Hipotesis biaya politik (*the political cost hypotheses*). Motivasi politik timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah (Widiatmaja, 2010).

Scott (2009) mengidentifikasi adanya empat pola yang dilakukan manajemen untuk melakukan pengelolaan atas laba sebagai berikut: (1) *Taking a bath*, yaitu ketika perusahaan melaporkan adanya kerugian, maka manajemen melakukan kebijakan untuk melaporkan kerugian dengan jumlah yang besar sekaligus; (2) *Income minimization*; kebijakan ini dilakukan ketika laba yang diperoleh perusahaan tinggi atau meningkat. Hal yang umum dilakukan manajemen dalam praktek ini adalah dengan meminimalkan laba, contohnya adalah dengan membebankan beban penelitian dan pengembangan lebih besar di periode berjalan; (3) *Income maximization*, kebijakan ini dilakukan ketika laba yang diperoleh perusahaan rendah atau menurun. Hal yang umum dilakukan manajemen dalam praktek ini adalah dengan memaksimalkan laba, contohnya adalah dengan mengalokasikan pendapatan tahun mendatang di periode berjalan; (4) *Income smoothing*, kebijakan ini dilakukan karena adanya motivasi manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan.

2.1.8 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme *Corporate Governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol di mana selanjutnya dilakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *Corporate Governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi jalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Schward, 1990 dalam Sabeni, 2005).

Menurut Lins dan Warnock (2004) dalam Fala (2007), secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok. Pertama *Internal mechanisms* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan yang kedua *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

Indonesia menganut sistem *dual board* dalam struktur organisasi internalnya, dimana adanya pemisahan fungsi dari *board* tersebut, yaitu fungsi pengambilan kebijakan dan fungsi pengawasan. Fungsi pengambilan kebijakan dijalankan oleh dewan direksi, sedangkan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dapat membentuk suatu komite audit untuk membantu menjalankan fungsi mereka. Komite audit diwajibkan beranggotakan paling tidak satu orang komisaris independen. Dewan komisaris dapat meminta kalangan luar, dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai anggota komite audit guna mencapai tujuan dari komite audit tersebut. Komite audit haruslah bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor, dan dengan demikian, komite audit hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Wardhani, 2010).

Corporate governance meliputi dewan komisaris dan komite audit sangat berperan mengendalikan kualitas pelaporan keuangan (Cohen *et al.*, 2002). Dalam penelitian ini mekanisme *corporate governance* yang digunakan adalah proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit. Adanya peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi pihak

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Sama halnya dengan peran komite audit yang mempunyai peran penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010). Ini membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* mampu mengurangi adanya praktik manipulasi terhadap laporan keuangan atau yang dikenal dengan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer.

2.1.8.1 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi), dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 2003). Sebagai wakil dari prinsipal di perusahaan dewan komisaris dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi dalam perusahaan.

Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki,

dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dengan mengungkapkan informasi lingkungan perusahaan, *image* perusahaan akan semakin baik (Gray *et al.*, 1988 dalam Anggraini, 2006). Dewan komisaris tentu menginginkan peningkatan citra perusahaan.

Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2005) yang membedakan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, yaitu:

1. Sistem Satu Tingkat atau *One Tier System*

Sistem satu tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu dewan direksi yang pada umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior (direktur eksekutif) dan direktur independen (non direktur eksekutif) yang bekerja dengan prinsip paruh waktu. Negara-negara yang menggunakan *One Tier System* misalnya adalah Amerika Serikat dan Inggris.

Gambar 2.1

Struktur Board of Director (BoD) dalam *One Tier System*



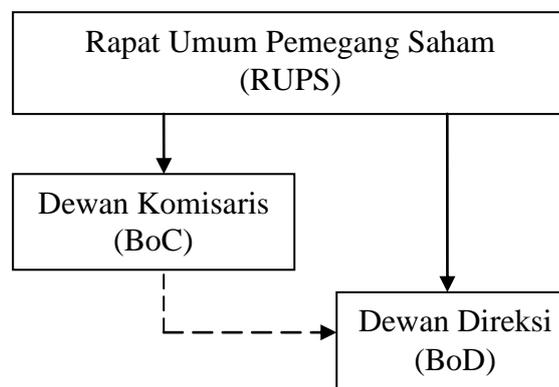
Sumber: FCGI (2005)

2. Sistem Dua Tingkat atau *Two Tiers System*

Sistem dua tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu dewan

pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi). Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris. Sehingga dewan komisaris terutama bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-negara yang menggunakan *Two Tiers System* adalah Denmark, Jerman, Belanda, Jepang termasuk juga Indonesia.

Gambar 2.2
Struktur BoD dan BoC dalam *Two Tiers System* yang berkembang di Indonesia



Sumber: FCGI (2005)

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris terdiri dari komisaris independen dan komisaris non-independen. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi, sedangkan komisaris non-independen merupakan komisaris yang terafiliasi. Yang dimaksud terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan anggota direksi dan dewan komisaris yang terafiliasi serta karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi (KNKG, 2006).

2.1.8.2 Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite-komite yang dapat membantu pelaksanaan tugasnya. Salah satunya adalah komite audit, yang memiliki tugas terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh (FCGI, 2005). Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, yaitu:

1. Laporan keuangan (*financial reporting*), adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan. Hasil usahanya, serta rencana dan komitmen jangka panjang;
2. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*), adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan

pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

3. Pengawasan perusahaan (*corporate control*). Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan oleh penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern.

Menurut KNKG (2006), jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Komite audit diketuai oleh komisaris independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan atau pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari beberapa alasan utama kemandirian ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan (FCGI, 2005).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian empiris tentang hubungan *corporate environmental disclosure* dengan manajemen laba belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian empiris sebelumnya banyak berfokus pada hubungan CSR dengan *corporate financial performance* (CFP). Chih *et al.* (2008) dan Prior *et al.* (2008) merupakan artikel kunci yang meneliti hubungan antara CSR dan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Chih *et al.* (2008) bertujuan untuk meneliti hubungan antara CSR dan EM ke dalam empat jenis hubungan yang mungkin terjadi di antara keduanya, yaitu hubungan positif, negatif, netral, dan tidak ada hubungan. Dalam penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sebanyak 1.653 di 46 negara yang diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Pertama, kelompok perusahaan CSR yang masuk ke dalam kelompok ini adalah perusahaan yang terdaftar di FTSE4 Good Global Index. Kedua, kelompok perusahaan non-CSR yaitu perusahaan yang terdaftar di FTSE All-World Developed Index. Data diambil dari periode Januari 1993 hingga Desember 2002. Chih menggunakan proksi manajemen laba, antara lain *income smoothing*, agresivitas laba, dan penundaan pengakuan kerugian dan laba yang berkurang. Hasilnya terdapat hubungan antara CSR dan EM. Sebuah perusahaan yang berkomitmen tinggi terhadap CSR cenderung untuk tidak melakukan *income smoothing* dan penghindaran pengakuan kerugian dan penurunan laba. Akan tetapi cenderung untuk melakukan agresivitas laba. Namun hal ini dapat dikurangi dengan penegakan hukum yang kuat.

Prior *et al.* (2008) meneliti hubungan antara CSR, CFP dan manajemen laba. Sampel yang digunakan adalah 593 perusahaan dari 26 negara yang diambil

dari *database Sustainable Investment Research International Company (SIRI)* dari tahun 2002 hingga 2004. Variabel yang digunakan adalah manajemen laba dan CFP sebagai variabel independen dan CSR sebagai variabel independen. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu investasi R&D, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, tingkat risiko manajerial, ukuran perusahaan, *leverage*, dan sumber daya keuangan. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi manajemen laba dan kegiatan CSR adalah kegiatan yang mahal bagi perusahaan dan dibenarkan bahwa praktik manajemen laba memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan. Dengan kata lain, Prior *et al.* (2008) menemukan bahwa hubungan antara CSR dan kinerja keuangan diperlemah dengan adanya praktik manajemen laba.

Gargouri *et al.* (2010) meneliti hubungan antara kinerja sosial perusahaan atau *corporate social performance (CSP)* dan manajemen laba di mana variabel yang digunakan sebagai pengukuran CSP adalah CG, lingkungan, dan karyawan. Dengan variabel kontrol adalah ukuran perusahaan, tingkat utang, bonus, *market to book ratio*, konsentrasi kepemilikan, auditor eksternal, dan jenis industri. Populasi yang diambil adalah perusahaan yang tercatat dalam *database CSID MJRA* sejak tahun 2004 sampai 2005, sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 109 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi CSP tentang lingkungan dan karyawan berhubungan signifikan positif terhadap manajemen laba. Hal ini menyatakan bahwa biaya yang ditanggung perusahaan yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup dapat mengurangi kinerja keuangan dan memberikan insentif bagi manajer untuk mengelola pendapatan.

CSP muncul untuk menciptakan kolusi antara manajer dan karyawan dengan tujuan berbagi keuntungan dari praktik manajemen laba.

Handajani *et al.* (2010) mengadakan penelitian untuk menguji pengaruh manajemen laba dan mekanisme CG dengan CSR *disclosure*. Sampel yang digunakan adalah 67 perusahaan publik yang terdaftar di BEI dengan periode dari tahun 2005 hingga 2007. Kemudian menggunakan variabel manajemen laba dan mekanisme CG yang diproksikan dengan komposisi dewan direksi independen, kepemilikan institusional, dan komite audit sebagai variabel independen. Menemukan hasil bahwa manajemen laba, komite audit, profil perusahaan, dan jenis industri berpengaruh signifikan terhadap CSR *disclosure*.

Sun *et al.* (2010) meneliti hubungan antara CED dan manajemen laba dan dampak mekanisme CG terhadap asosiasi tersebut. Menggunakan sampel 245 perusahaan non-keuangan Inggris untuk tahun yang berakhir pada Maret 2007. Mekanisme CG yang digunakan adalah ukuran dewan direksi, jumlah rapat komite audit. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan *leverage*, profitabilitas, dan jenis industri. Sun *et al.* (2010) menemukan adanya hubungan yang signifikan antara CED dan manajemen laba. Kemudian juga menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Akan tetapi tidak ditemukan pada ukuran dewan direksi.

Ringkasan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Ringkasan Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Chih <i>et al.</i> (2008)	<i>Corporate Social Responsibility, Investor Protection, and Earnings Management: Some International Evidence</i>	Meneliti hubungan antara <i>corporate social responsibility</i> (CSR) dengan manajemen laba	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: manajemen laba dengan <i>proxy</i> (<i>income smoothing</i>, agresivitas laba, penundaan pengakuan kerugian) • Dependen: CSR 	Perusahaan dengan komitmen CSR yang tinggi cenderung melakukan agresivitas laba. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya <i>income smoothing</i> dan penundaan pengakuan kerugian.
2.	Prior <i>et al.</i> (2008)	<i>Earnings Management and Corporate Social Responsibility</i>	Meneliti hubungan antara CSR, <i>corporate financial performance</i> (CFP) dan praktik manajemen laba	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: manajemen laba dan CFP • Dependen: CSR • Kontrol: investasi R&D, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional, tingkat risiko, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, sumber daya keuangan atau <i>financial resources</i> 	Perusahaan dengan aktivitas CSR yang tinggi sangat mungkin terlibat dalam praktik manajemen laba.
3.	Gargouri <i>et al.</i> (2010)	<i>The Relationship between Corporate Social Performance and Earnings Management</i>	Menilai hubungan antara <i>corporate social performance</i> (CSP) dan manajemen laba	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: CSP (kriteria pengukuran: <i>corporate governance</i> (CG), lingkungan, karyawan) • Dependen: manajemen laba • Kontrol: ukuran perusahaan, tingkat hutang, bonus, rasio <i>market to book</i>, konsentrasi kepemilikan, auditor eksternal, jenis industri 	Menemukan bahwa dimensi CSP tentang lingkungan dan karyawan berhubungan positif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan CG berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Tujuan	Variabel	Hasil Penelitian
4.	Handajani <i>et al.</i> (2010)	<i>The Effect of Earnings Management and Corporate Governance Mechanism to Corporate Social Responsibility Disclosure: Study at Public Companies In Indonesia Stock Exchange</i>	Menguji pengaruh manajemen laba dan mekanisme CG dengan CSR <i>disclosure</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: manajemen laba, mekanisme CG (komposisi dewan direksi independen, kepemilikan institusional, komite audit) • Dependen: CSR <i>disclosure</i> • Kontrol: profil perusahaan, jenis industri, leverage 	Menemukan bahwa manajemen laba, komite audit, profil perusahaan, jenis industri berpengaruh signifikan terhadap CSR <i>disclosure</i> .
5.	Sun <i>et al.</i> (2010)	<i>Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance and Earnings Management</i>	Meneliti hubungan antara <i>corporate environmental disclosure</i> (CED) dan manajemen laba dan dampak mekanisme CG terhadap asosiasi tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Independen: manajemen laba • Dependen: CED • Moderating: CG (ukuran dewan direksi, jumlah rapat komite audit) • Kontrol: ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, profitabilitas, jenis industri 	Menemukan adanya hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Kemudian juga menemukan bahwa jumlah rapat komite audit memiliki hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Akan tetapi tidak ditemukan pada ukuran dewan direksi.

Sumber: diringkas dari berbagai jurnal

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sun *et al.* (2010), antara lain adalah tidak digunakannya variabel ukuran dewan direksi (*board size*) sebagai pengukuran (*proxy*) dari mekanisme *corporate governance* karena disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan sistem dua tingkat atau *two tier board system*, yang memisahkan fungsi eksekutif (direksi) dan fungsi pengawasan (komisaris). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini variabel ukuran dewan direksi (*board size*) diganti dengan variabel dewan komisaris dengan menggunakan *proxy*

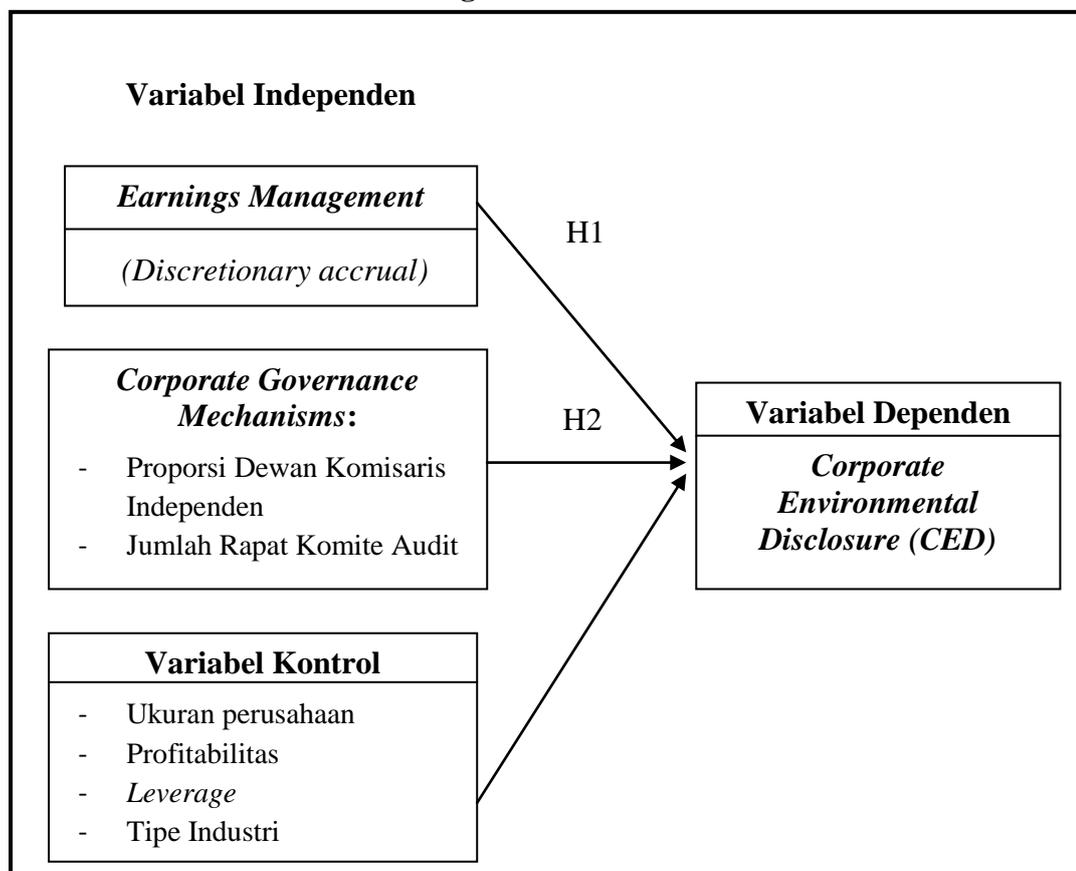
yaitu proporsi dewan komisaris independen. Penggantian mekanisme *corporate governance* dari variabel moderating menjadi variabel independen berdasarkan pada penelitian Handajani *et al.* (2010) yang menguji tentang pengaruh manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* terhadap *corporate social responsibility disclosure*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah kerangka konseptual berdasarkan telaah literatur diatas, yang dapat digambarkan dalam bentuk diagram skematik sebagai berikut :

Gambar 2.3

Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola laba. Fleksibilitas manajemen dalam penyusunan laporan laba dapat mengurangi keandalan laporan keuangan karena laporan ini tidak mencerminkan kondisi pendapatan sebenarnya yang diperoleh perusahaan (Handajani *et al.*, 2010). Tindakan-tindakan manajerial yang dengan sengaja menyamarkan nilai sebenarnya dari aset perusahaan, transaksi, atau posisi keuangan, memiliki konsekuensi negatif bagi pemegang saham, karyawan, masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan, masyarakat luas, reputasi manajer, keamanan kerja dan kelangsungan karir manajer (Zahra *et al.*, 2005 dalam Prior *et al.*, 2010). Salah satu cara yang mungkin digunakan manajer untuk melindungi posisinya di perusahaan dan mempertahankan aliran modal dari pihak eksternal adalah dengan terlibat dalam aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan antara *stakeholder* dan aktivis lingkungan, yang dikenal sebagai *corporate social responsibility* (CSR).

Hubungan antara *corporate environmental disclosure* (CED) sebagai proksi dari CSR dengan manajemen laba dapat dijelaskan melalui pandangan *entrenchment effect*. Pandangan *entrenchment effect* menyatakan bahwa CED merupakan perlindungan atau pertahanan (*entrenchment*) bagi manajer yang

melakukan aktivitas yang dapat mengurangi kemakmuran pemegang saham dari luar perusahaan seperti praktik manajemen laba (Prior *et al.*, 2010). Dengan melakukan CED, perusahaan dapat membangun citra positif di mata *stakeholder* dan dukungan serta kepercayaan dari *stakeholder* karena kepeduliannya terhadap lingkungan perusahaan. Dalam jangka panjang, strategi ini memungkinkan manajer menghadapi tekanan dari *stakeholder* sebagai hasil dari terdeteksinya praktik manajemen laba.

Melalui kegiatan CED, manajer mengejar tujuan-tujuan yang berbeda seperti agar diliput oleh media, legitimasi dari masyarakat, peraturan pemerintah yang lebih menguntungkan dan pengawasan yang tidak terlalu ketat dari investor dan karyawan. Pada dasarnya, seorang manajer percaya bahwa dengan memuaskan kepentingan *stakeholder* dan memproyeksikan kepedulian terhadap sosial dan lingkungan dapat mengurangi pengawasan dari *stakeholder* tentang praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer (Prior *et al.*, 2010).

Sejalan dengan pandangan di atas hasil penelitian yang dilakukan Sun *et al.* (2010) menunjukkan adanya hubungan signifikan antara CED dan manajemen laba. Hasil ini menunjukkan bahwa manajer yang terlibat dalam praktik manajemen laba termotivasi untuk mencari persepsi positif dari beragam kelompok pemegang saham dan *stakeholder* lainnya melalui kegiatan CED. Dengan uraian di atas hipotesis yang diajukan adalah :

H₁ : Manajemen laba berpengaruh positif terhadap *corporate environmental disclosure*

2.4.2 Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Environmental Disclosure*

Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan pelaksanaan *corporate governance* adalah mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Implementasi CSR merupakan salah satu wujud pelaksanaan prinsip *corporate governance*. Perusahaan yang telah melaksanakan *corporate governance* dengan baik sudah seharusnya melaksanakan aktivitas CSR sebagai wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan sosial.

Corporate environmental disclosure (CED) sebagai proksi CSR merupakan sinyal peringatan bagi pembuat kebijakan bahwa kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan juga perlu diikuti oleh kebijakan yang mendukung, untuk menghindari perilaku oportunistik. Oleh karena itu, mekanisme *corporate governance* perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk dapat mengendalikan aspek negatif dari kegiatan CED bagi masyarakat, seperti kecurangan perusahaan, pelanggaran peraturan dan hukum, dan ketidakpatuhan terhadap norma sosial (Kurihama, 2007 dalam Handajani *et al.*, 2010). CED sebagai fokus dari *corporate governance* akan menjadi alat untuk menggabungkan perhatian sosial dan lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang tidak hanya akan bermanfaat bagi investor tetapi juga pelanggan dan masyarakat (Gill, 2008).

Mekanisme *corporate governance* dapat diproksi dengan proporsi dewan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit.

2.4.2.1 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Proporsi dewan komisaris akan menentukan kebijakan perusahaan termasuk praktek dan pengungkapan CSR. Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa keberadaan dewan komisaris independen akan semakin menambah efektifitas pengawasan. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat ketentuan yang mengatur tentang keberadaan dewan komisaris independen. Ketentuan yang dimaksud adalah Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Ketentuan ini memberikan pengaruh terhadap pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen dalam operasi perusahaannya, diantaranya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan demikian, tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari *stakeholder* dengan mengungkapkan tanggung jawab sosial akan dapat diperoleh karena keberadaan dewan komisaris independen akan memberikan pengendalian dan pengawasan.

Menurut Haniffa dan Cooke (2002), apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Dengan kata lain, komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan

mampu melindungi seluruh *stakeholder* perusahaan sehingga hal ini dapat mendorong pengungkapan *corporate environmental disclosure* lebih luas. Berdasarkan uraian tersebut hipotesis penelitian berikutnya yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

H_{2a} : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap
corporate environmental disclosure

2.4.2.2 Jumlah Rapat Komite Audit

Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya komite audit melakukan rapat atau pertemuan untuk melakukan koordinasi agar dapat menjalankan tugas secara efektif dalam hal pengawasan laporan keuangan, pengendalian internal, dan pelaksanaan *good corporate governance*.

Penelitian Putri (2009) yang menemukan adanya hubungan antara jumlah pertemuan komite audit yang berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi laba perusahaan. Hal ini berarti, semakin sering komite audit mengadakan pertemuan maka pengungkapan informasi laba perusahaan semakin transparan. Ini berarti semakin besar jumlah rapat komite audit, *discretionary accruals* semakin rendah, dan dapat mendukung peningkatan pengungkapan CED.

H_{2b} : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap *corporate environmental disclosure*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah apapun yang membedakan atau membawa variasi pada nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini digunakan berbagai variabel yang digunakan untuk melakukan analisis data. Variabel tersebut terdiri dari variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *corporate environmental disclosure* sedangkan variabel independen adalah manajemen laba dan mekanisme *corporate governance*. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan tipe industri.

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel terikat dan dipengaruhi oleh variabel lainnya (Ghozali, 2009). Variabel dependen pada penelitian ini adalah *corporate environmental disclosure*. *Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi terkait lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan (Suratno dkk., 2006). Pengukuran *corporate environmental disclosure* dapat diperoleh melalui pengungkapan CSR dalam *annual report* maupun melalui *sustainability report* yang biasanya terpisah.

Penilaian menggunakan indeks GRI (*Global Reporting Initiative*) telah dipakai oleh kurang lebih 1500 perusahaan di 60 negara (Nuraini, 2010). Indeks

ini bersifat internasional yang memiliki format dan isi laporan lengkap dalam menyediakan informasi serta dapat digunakan untuk berbagai macam sektor dan ukuran perusahaan. Jumlah item CSR pengungkapan menurut GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi (9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja (14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item). Namun dalam penelitian ini indikator yang digunakan hanyalah indikator kinerja lingkungan. Dimensi lingkungan menyangkut keberlanjutan organisasi berdampak pada kehidupan di dalam sistem alam, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator kinerja lingkungan terkait dengan *input* (bahan, energi, air) dan *output* (emisi/gas, limbah sungai, limbah kering/sampah). Selain itu, kinerja mereka mencakup kinerja yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, kepatuhan lingkungan, dan informasi yang berkaitan lainnya seperti limbah lingkungan dan dampak dari produk dan jasa (www.globalreporting.org). Berdasarkan bidang lingkungan (*environment*), indeks GRI terdiri dari 1 dimensi dan 9 aspek dengan 30 item. Secara rinci, kategori pengungkapan kinerja lingkungan yang sesuai dengan pedoman GRI dapat dilihat pada lampiran B.

Dalam penelitian ini, pengungkapan item *environmental disclosure* dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$N = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item pengungkapan lingkungan GRI}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variable bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan

atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan mekanisme *corporate governance*.

3.1.2.1 Manajemen Laba

Manajemen laba menggunakan proksi *discretionary accrual*. Dalam penelitian ini manajemen laba diukur menggunakan model yang dikembangkan oleh Kothari *et al.* (2005). Model tersebut merupakan pengembangan dari model *modified Jones* (Dechow *et al.*, 1995) dengan menambahkan kinerja perusahaan – *return on assets* – sebagai variabel kontrol dalam regresi total akrual (Sun *et al.*, 2010). Tahap-tahap penentuan *discretionary accrual* adalah seperti berikut:

(1) Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan aliran kas (*cash flow approach*), yaitu:

$$TACC_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \quad (1)$$

Dimana:

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t

(2) Menentukan koefisien dari regresi total akrual.

Akrual diskresioner merupakan perbedaan antara total akrual (TACC) dengan *nondiscretionary accrual* (NDACC). Langkah awal untuk menentukan *nondiscretionary accrual* yaitu dengan melakukan regresi sebagai berikut:

$$TACC_{it}/TA_{it-1} = \beta_1 (1/TA_{it-1}) + \beta_2 ((\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_3 (PPE_{it}/TA_{it-1}) + \beta_4 (ROA_{it-1}/TA_{it-1}) + e \quad (2)$$

Dimana:

$TACC_{it}$ = Total akrual perusahaan i pada tahun t (yang dihasilkan dari perhitungan nomor 1 di atas)

TA_{it-1} = Total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV_{it} = Perubahan laba perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it} = Perubahan piutang bersih (*net receivable*) perusahaan i pada tahun t

PPE_{it} = *Property, plant and equipment* perusahaan i pada tahun t

ROA_{it-1} = *Return on assets* perusahaan i pada akhir tahun t-1

(3) Menentukan *nondiscretionary accrual*.

Regresi yang dilakukan di (2) menghasilkan koefisien β_1 , β_2 , β_3 dan β_4 .

Koefisien β_1 , β_2 , β_3 dan β_4 tersebut kemudian digunakan untuk memprediksi *nondiscretionary accrual* melalui persamaan berikut:

$$NDACC_{it} = \beta_1(1/TA_{it-1}) + \beta_2((\Delta REV_{it}-\Delta REC_{it})/TA_{it-1}) + \beta_3(PPE_{it}/TA_{it-1}) + \beta_4(ROA_{it-1}/TA_{it-1}) + e \quad (3)$$

Dimana:

$NDACC_{it}$ = *Nondiscretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

e = Error

(4) Menentukan *discretionary accrual*.

Setelah didapatkan akrual nondiskresioner, kemudian *discretionary accrual* bisa dihitung dengan mengurangkan total akrual (hasil perhitungan di (1)) dengan *nondiscretionary accrual* (hasil perhitungan di (3)).

$$DACC_{it} = (TACC_{it}/TA_{it-1}) - NDACC_{it} \quad (4)$$

Dimana:

$DACC_{it}$ = *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

3.1.2.2 Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance merupakan suatu susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholders* internal dan eksternal lainnya sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FGCI, 2005). Mekanisme *corporate governance* dalam penelitian ini adalah :

1. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Proporsi dewan komisaris independen =

$$\frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota dewan komisaris}}$$

2. Jumlah Rapat Komite Audit

Jumlah rapat komite audit merupakan jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun. Jumlah rapat komite audit diukur dengan cara melihat jumlah rapat yang dilakukan komite audit pada

laporan tahunan perusahaan yang tercantum pada laporan tata kelola perusahaan maupun laporan komite audit.

3.1.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel bebas yang dalam pelaksanaan penelitian tidak dimasukkan sebagai variabel bebas tetapi justru keberadaannya dikendalikan (dikontrol). Dengan mengendalikan beberapa variabel tersebut, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat merupakan pengaruh yang bersih (murni) dan variabel yang dikendalikan tersebut tidak lagi mencemari variabel terikatnya (Zainal, 2009). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan tipe industri.

3.1.3.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan sampel terdapat di dalam laporan tahunan perusahaan. Ukuran perusahaan yang diukur dari total aset akan ditransformasikan dalam bentuk logaritma dengan tujuan untuk menyamakan dengan variabel lain, karena nilai total aset perusahaan relatif lebih besar dibandingkan dengan variabel-variabel lain dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \log (\text{nilai buku total aset})$$

3.1.3.2 Profitabilitas

Profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Terdapat beberapa ukuran untuk menentukan profitabilitas perusahaan, yaitu: *return of equity*, *return on assets*, *earning per share*, *net profit* dan *operating ratio*. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor baik pemegang obligasi maupun pemegang saham (Riyanto, 2001). Rasio ini merupakan rasio yang terpenting untuk mengetahui profitabilitas suatu perusahaan. *Return on asset* merupakan ukuran efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Adapun pengukurannya dengan menggunakan rumus :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak (EAT)}}{\text{Total aktiva}}$$

3.1.3.3 Leverage

Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan operasinya. Hal ini menggambarkan berapa tingkat kelebihan kewenangan yang dimiliki oleh *debtholders* dibandingkan dengan kewenangan *shareholders*. Rasio *leverage* diukur dengan membagi total utang dengan jumlah ekuitas perusahaan. *Leverage* perusahaan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LEV} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

3.1.3.4 Tipe Industri

Tipe industri diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu pemberian skor 1 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri *high-profile*, dan skor 0 untuk perusahaan yang termasuk dalam industri *low-profile*. Robert (1992) dalam Anggraini (2006) menggambarkan industri *high-profile* sebagai industri yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan (*consumer visibility*), risiko politik yang tinggi atau kompetisi yang tinggi. Keadaan tersebut membuat perusahaan menjadi lebih mendapatkan sorotan oleh masyarakat luas mengenai aktivitas perusahaannya. Industri *low-profile* adalah kebalikannya.

Klasifikasi tipe industri yang diuraikan oleh banyak peneliti terdahulu sifatnya sangat subjektif dan berbeda-beda. Robert (1992) dalam Hackson dan Milne (1996) mengelompokkan perusahaan otomotif, penerbangan dan minyak sebagai industri yang *high-profile*, sedangkan Diekers dan Perston (1997) dalam Hackson dan Milne (1996) mengatakan bahwa industri ekstraktif merupakan industri yang *high-profile*. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri migas, kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan, kimia, otomotif, barang konsumsi, makanan dan minuman, kertas, farmasi, plastik, dan konstruksi sebagai industri yang *high-profile*.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI, dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan non keuangan lebih banyak mempunyai pengaruh/dampak terhadap lingkungan di sekitarnya sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan periode penelitian tahun 2008 dan 2009, dengan alasan: pada 20 Juli 2007 telah dikeluarkan UU PT yang didalamnya memuat kewajiban pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baru berlaku secara efektif pada akhir tahun 2007. Dengan demikian, peneliti menggunakan laporan tahunan periode 2008 dan 2009 karena pada tahun tersebut perusahaan dianggap telah mampu dan siap untuk melakukan pengungkapan dan pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungannya dibandingkan dengan tahun 2007.

3.2.2 Sampel penelitian

Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu :

1. Perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI untuk tahun 2008 dan 2009.

2. Perusahaan tersebut mengikuti Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2008-2009.
3. Menyediakan laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan lengkap selama tahun 2008 dan 2009.
4. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada (<http://www.idx.co.id>), *database* pasar modal pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang, dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri laporan tahunan yang terpilih menjadi sampel. Sebagai panduan, digunakan instrumen penelitian berupa *check list* atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang berisi item-item pengungkapan informasi lingkungan perusahaan.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-

angka dan dengan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis dan memerlukan beberapa alat analisis. Bila serangkaian observasi atau pengukuran data dalam angka-angka, maka pengumpulan angka-angka hasil observasi atau pengukuran sedemikian itu dinamakan data kuantitatif (Dajan, 1996).

Analisis kuantitatif dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah dengan alat bantu yang berhubungan dengan statistik dan matematika sehingga keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (Supranto, 1998). Analisis data kuantitatif dengan cara mengumpulkan data yang sudah ada kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan dibuat analisis agar dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk mempermudah dalam menganalisis digunakan SPSS (*Statistical Package for Social Science*), yaitu software yang berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik dengan basis Windows (Ghozali, 2009). Teknik analisis statistika yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan regresi linier berganda. Dalam melakukan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik agar memenuhi sifat estimasi regresi bersifat BLUES (*Best Linear Unbiased Estimator*).

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtoses dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik

deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai mekanisme *corporate governance*, manajemen laba dan *corporate environmental disclosure* pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan perhitungan statistik regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, maka diadakan pengujian asumsi klasik. Menurut Imam Ghozali (2009) uji asumsi klasik terdiri dari:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi maka digunakanlah uji *kolmogorof smirnov* dan analisis grafik. Dalam uji ini, jika dihasilkan taraf signifikansi lebih besar dari 5%, hal ini berarti data yang akan diolah memiliki distribusi normal, sebaliknya jika taraf signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 5%, maka data tidak terdistribusi secara normal. Selain itu juga digunakan analisis grafik, dalam grafik yang dihasilkan jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas data, sebaliknya jika

data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

1. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolonieritas. Multikolonieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.
3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik.
- 2) Jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikolinearitas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2009) :

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan Uji Durbin Watson (DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel bebas.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya (Sugiyono, 2007). Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya.

Dalam penelitian ini model regresi berganda yang akan dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{CED}_{it} = & \alpha_0 + \alpha_1 \text{DA}_{it} + \alpha_2 \text{INKOM}_{it} + \alpha_3 \text{RADIT}_{it} + \alpha_4 \text{SIZE}_{it} + \alpha_5 \text{LEV}_{it} + \alpha_6 \text{ROA}_{it} \\ & + \alpha_7 \text{INDUSTRI} + e \end{aligned}$$

Dimana:

CED_{it} = *Corporate environmental disclosure*

α_0 = Konstanta

$\alpha_1-\alpha_7$ = Koefisien

DA_{it} = Manajemen laba diproksi dengan *discretionary accrual (DA)*.

$INKOM_{it}$ = Proporsi dewan komisaris independen

$RADIT_{it}$ = Jumlah rapat komite audit

$SIZE_{it}$ = Ukuran perusahaan dihitung dengan log total aset

LEV_{it} = Rasio *Leverage (Debt to Equity Ratio)*

ROA_{it} = Profitabilitas diproksi dengan *Return On Assets*

$INDUSTRI$ = Tipe industri (*low profile* dan *high profile*)

3.5.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *corporate environmental disclosure*, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah manajemen laba.

3.5.4.1 Uji Statistik t

Uji t digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara linier antara variabel bebas dan variabel tergantung.

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.

- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a , artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Uji t dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan versi 17.0. jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.5.4.2 Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi koefisien regresi secara keseluruhan dan pengaruh variabel bebas secara bersama-sama.

- a. Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.
- b. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F dapat dilakukan hanya dengan melihat nilai signifikansi F yang terdapat pada output hasil analisis regresi yang menggunakan versi 17.0. jika angka signifikansi F lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

3.5.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) ini digunakan untuk menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen (Ghozali, 2009). Koefisien determinasi (R^2) dinyatakan dalam persentase. Nilai koefisien korelasi (R^2) ini berkisar antara $0 < R^2 < 1$.